

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang kepastian hukum dalam penerapan hukuman mati di Indonesia, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan tentang kepastian hukum dalam penerapan hukuman mati di Indonesia? dan 2) Bagaimanakah kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian: 1). menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang masih menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok, dan KUHP baru yang mengatur hukuman mati sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan. 2). pelaksanaan hukuman mati belum mencerminkan asas kepastian hukum karena tidak adanya batas waktu pelaksanaan eksekusi dan belum adanya peraturan teknis yang mengaturnya secara jelas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan dan pelaksanaan hukuman mati masih membuka ruang multitafsir dan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, saran dalam penelitian ini adalah agar pemerintah segera menetapkan peraturan teknis tentang batas waktu eksekusi, dan penegak hukum menjalankan eksekusi secara konsisten dan sesuai dengan asas keadilan dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Hukuman Mati, Tindak Pidana Narkoba.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze the regulation of legal certainty in the application of the death penalty in Indonesia, as well as legal certainty in the implementation of the death penalty for perpetrators of narcotics crimes. The formulation of the problem in this study is: 1) How is the arrangement of legal certainty in the application of the death penalty in Indonesia? and 2) What is the legal certainty in the implementation of the death penalty for perpetrators of narcotics crimes in Indonesia? The research method used is normative juridical with legislative, conceptual, and case approaches. 1). The results of the study show that there is a disharmony between Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which still places the death penalty as the main crime, and the new Criminal Code which regulates the death penalty as an alternative penalty with a probation period. In addition, the implementation of the death penalty does not reflect the principle of legal certainty because there is no deadline for execution and there is no technical regulation that clearly regulates it. 2). The conclusion of this study is that the regulation and implementation of the death penalty still opens up space for multiple interpretations and legal uncertainty that are contrary to the principle of the state of law. Therefore, the suggestion in this study is that the government should immediately establish technical regulations on execution deadlines, and that law enforcement carry out executions consistently and in accordance with the principles of justice and human rights.

Keywords: *Legal certainty, Death Penalty, Narcotics Crime*